

MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH - PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2025

PERBUP. BLORA NO.1, BD 2025/NO.1, LL KABUPATEN BLORA, 12 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 03.HK/KPTS/Mn/2024-Nomor: 3015/KPTS/M/2024 Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan Bupati mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Ps. 18 ayat (6) UUDNRI Th. 1945; UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMEN PU DAN PERUMAHAN No. 1 Tahun 2021; PERDA KAB. BLORA No. 6 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpendhasilan rendah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Persyaratan dan kreteria untuk mendapatkan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpendhasilan rendah . Tata cara pelaksanaan pemberian pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpendhasilan rendah.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.